

IMPLEMENTASI PROGRAM KURIKULUM 2013 DI SMP NEGERI 7 SAMARINDA

Rina Hariana¹

ABSTRAK

Rina Hariana, Implementasi Program Kurikulum 2013 Di SMP Negeri 7 Samarinda. Bimbingan Bapak Dr. Djumadi, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Enos Paselle, M.AP selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi kebijakan program kurikulum 2013 di SMP Negeri 7 Samarinda serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat program kurikulum 2013. Fokus penelitian ini yaitu sosialisasi kurikulum, kualitas tenaga pengajar, sarana dan prasarana serta proses pembelajaran kurikulum 2013 dikelas.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, sumber data pada penelitian ini yakni key informan adalah Kepala Sekolah dan Kasi Kurikulum Dinas Pendidikan Kota Samarinda dan informan adalah guru dan siswa-siswi yang diperoleh dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Kesimpulan penelitian diperoleh gambaran bahwa sosialisasi kurikulum 2013 yang dilakukan oleh pemerintah belum maksimal. Tenaga pengajar masih banyak yang belum memahami proses penilaian yang menggunakan teknologi informasi yang dianggap rumit. Kemudian sarana dan prasarana belum sepenuhnya menunjang sehingga menjadi faktor penghambat dalam kegiatan pembelajaran. Adanya perubahan kurikulum sangat mempengaruhi mutu pendidikan namun sejauh penerapannya masih menuai pro dan kontra.

Kata kunci : Kurikulum, Tenaga Kependidikan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 Butir 1 menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam undang-undang tersebut, pemerintah menjamin upaya pengendalian kualitas.

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : harianarina@gmail.com

Untuk menjawab tantangan di era pesatnya teknologi informasi dan lemahnya mutu pendidikan kita sekarang ini maka pemerintah membuat kebijakan baru yaitu membuat program kurikulum baru yang merupakan rujukan dari kurikulum lama yakni dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) ke Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan yang sekarang ini adalah program kurikulum 2013 yang merupakan rujukan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 yang lebih ditekankan pada kompetensi dengan pemikiran kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Selain itu hal yang paling mendasar pada perubahan kurikulum 2013 ini adalah agar kurikulum yang akan diterapkan tersebut mampu menjawab tantangan zaman yang terus berubah tanpa dapat dicegah, dan untuk mempersiapkan peserta didik yang mampu bersaing di masa depan dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesiapan guru sangat urgent dalam pelaksanaan kurikulum ini. Kesiapan guru ini akan berdampak pada kegiatan guru dalam mendorong mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah mereka peroleh setelah menerima materi pembelajaran.

Kalimantan Timur khususnya Samarinda juga mengambil peran dalam pembentukan karakter anak bangsa melalui penerapan program kurikulum 2013. Setelah diedarkannya surat pencabutan sementara penerapan program kurikulum 2013 disekolah-sekolah seluruh Indonesia namun ada beberapa sekolah unggulan yang memang masih menerapkan kurikulum 2013 yang kemudian dianggap menjadi sekolah percontohan program kurikulum 2013. Dimana SMP Negeri 7 Samarinda menjadi bagian dari beberapa sekolah menengah pertama di Samarinda yang menjadi pilot project dari program kurikulum 2013.

Di SMP Negeri 7 sendiri program kurikulum 2013 memang baru mulai dilaksanakan selama tiga semester, sejauh ini masih banyak pro dan kontra dalam masyarakat, orangtua murid, tenaga pengajar, bahkan murid-murid yang menjadi imbas, dari sosialisasinya belum terlaksana secara menyeluruh sehingga banyak tenaga pengajar yang belum memahami proses penilaian dalam penginputan nilai juga kurang keahlian dalam mengoperasikan komputer dan terbatasnya sarana dan prasarana sebagai media pembelajaran.

Dari permasalahan inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat judul “Implementasi Program Kurikulum 2013 di SMP Negeri 7 Samarinda”.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Program Kurikulum 2013 di SMP Negeri 7 Samarinda ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Program Kurikulum 2013 di SMP Negeri 7 Samarinda ?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi kebijakan program kurikulum 2013 di SMP Negeri 7 Samarinda.
2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat program kurikulum 2013 di SMP Negeri 7 Samarinda.

KERANGKA DASAR TEORI

Kebijakan Publik

Menurut Mustopodidjaja dalam Rakhmat (2009:132) dikatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan. Dalam kehidupan administrasi publik, secara formal keputusan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk perundang-undangan.

Jenis-jenis Kebijakan Publik

Menurut Nugroho dalam Pasolong (2010:40) kebijakan publik dibagi menjadi 3 kelompok, kelompok tersebut antara lain:

1. Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum.
2. Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati/peraturan wali kota.
3. Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.

Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Widodo (2010:85) implementasi merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy process sekaligus studi yang sangat crucial). Karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan. Demikian pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, jika tidak dirumuskan dengan baik maka tujuan kebijakan juga tidak akan bisa diwujudkan.

Menurut Indiahono (2009:143) implementasi kebijakan menunjukkan aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh organ pemerintah maupun para pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan itu sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementor dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang

bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan. Kelompok sasaran adalah menunjuk para pihak yang dijadikan sebagai objek kebijakan.

Dengan demikian implementasi kebijakan publik adalah salah satu tahap yang menentukan apakah suatu kebijakan yang telah dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah telah benar-benar diaplikasikan dengan baik di lapangan dan sejauh mana parameter keberhasilan dari implementasi kebijakan itu sendiri.

Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam studi kebijakan publik terdapat banyak model implementasi, diantara model implementasi kebijakan publik adalah model George C. Edward III. Model ini mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tadi antara lain meliputi variabel atau faktor communication, sumber daya , disposisi, dan struktur birokrasi.

Kontrol Pelaksanaan Kebijakan Publik

Strategi melakukan kontrol pengawasan kegiatannya sama dengan strategi implementasi, yaitu:

1. Pelaku Kontrol Pelaksanaan Kebijakan
2. Standar Prosedur Operasi Kontrol
3. Sumber Daya Keuangan dan Peralatan
4. Jadwal Pelaksanaan Kontrol

Analisis Evaluasi Kinerja Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai penilaian terhadap kinerja suatu kebijakan. Menilai kinerja kebijakan tidak bisa lepas dari persoalan metode atau mode, standar dan indikator kinerja. Metode (model) penilaian kinerja kebijakan satu dengan lainnya. Implikasi standar dan indikator kinerja kebijakan yang digunakan juga berbeda.

Beberapa metode penilaian kinerja kebijakan yang sering digunakan antara lain meliputi input and output performance model, basic production model, balance score-card model, dan masih banyak metode atau model lainnya. Model input and output performance model , dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara dengan lebih menekankan pada pencapaian hasil pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, basic production model tidak jauh berbeda dengan model sebelumnya. Model ini dikembangkan oleh Hodge (1993) yang lebih menekankan pada Cost-Effectiveness bisa diketahui manakala telah diketahui efisiensi dan efektivitas kebijakan. Sementara itu balance score-card model dikembangkan oleh Homgren (1999:333) dengan lebih menekankan pada pencapaian hasil, namun tidak hanya untuk jangka pendek, tetapi juga untuk jangka panjang (LAN, 2002:9). Untuk mengukur kinerja kebijakan, model ini mempersyaratkan empat perspektif tolak ukur kinerja yaitu (a) keuangan, (b) kepuasan pelanggan, (c) penyempurnaan proses internal, dan (d) pembelajaran dan inovasi/pertumbuhan.

Kurikulum

Menurut Grayson dalam Sagala (2009: 141) kurikulum adalah suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran (out-comes) yang diharapkan dari suatu pelajaran. Perencanaan tersebut disusun secara terstruktur untuk suatu bidang studi, sehingga memberikan pedoman dan intruksi untuk mengembangkan strategi pembelajaran materi dalam kurikulum harus diorganisasikan dengan baik agar sasaran (goals) dan tujuan (objectives) pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Tenaga Pendidik dan Peranannya dalam Implementasi Kurikulum 2013

Menurut Fuad Hasan terkait dengan peranan guru dalam implementasi kurikulum adalah sebaik apapun kurikulum jika tidak didukung oleh guru yang berkualitas, maka semuanya akan sia-sia. Sebaliknya, kurikulum yang kurang baik akan dapat ditopang oleh guru yang berkualitas. Hal senada dipertegas oleh Mulyasa bahwa betapapun bagusnya suatu kurikulum (official), tetapi hasilnya sangat tergantung pada apa yang dilakukan oleh guru yang berkualitas.

Metode Pembelajaran Kurikulum 2013

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam proses pembelajaran sehingga diperoleh hasil yang optimal. Adapun berbagai metode pembelajaran yang dapat digunakan pendidik dalam kegiatan pembelajaran, antara lain:

- a. Metode ceramah
- b. Metode latihan
- c. Metode tanya jawab
- d. Metode karya wisata
- e. Metode demonstrasi
- f. Metode sosiodrama
- g. Metode bermain peran
- h. Metode diskusi
- i. Metode pemberian tugas dan resitasi
- j. Metode eksperimen
- k. Metode proyek

Definisi Konsepsional

Implementasi Kebijakan Program Kurikulum 2013 adalah Penerapan kebijakan pemerintah terkait pendidikan melalui kurikulum berbasis pendidikan karakter yang didalamnya melibatkan komponen yang saling terkait dalam proses pengembangan serta menuntut keterampilan teknis dari tenaga kependidikan kepada pengembangan peserta didik.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu peristiwa/fenomena secara sistematis sesuai dengan apa adanya.

Fokus Penelitian

1. Implementasi program kurikulum 2013 indikatornya adalah :
 - a. Sosialisasi Kurikulum
 - b. Kualitas Tenaga Kependidikan
 - c. Sarana dan Prasarana
 - d. Proses Pembelajaran
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan program kurikulum 2013.

Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi atau data-data yang dianggap perlu dan mendukung, maka akan dibutuhkan informasi yang ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball Sampling*. Adapun yang menjadi key-informan adalah Kepala Sekolah dan Kepala Bagian Kurikulum di Dinas Pendidikan Samarinda dan yang menjadi informan adalah Tenaga Pengajar (Guru) dan sebagian siswa-siswi SMP Negeri 7 Samarinda.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Kaelan (2005:182) ada 3 proses kegiatan yang dilakukan peneliti, yaitu :

1. Proses memasuki lokasi penelitian (*Getting In*), yaitu peneliti perlu memahami latar penelitian terlebih dahulu.
2. Ketika Berada di Lokasi Penelitian (*Getting Along*), yaitu peneliti berusaha untuk melakukan hubungan pribadi dan membangun kepercayaan pada subyek penelitian.
3. Mengumpulkan data (*Logging the Data*), ada 3 tahapan dalam pengumpulan data:
 - a. Wawancara mendalam, wawancara ini tidak dilakukan dengan struktur yang ketat, tetapi dengan pertanyaan yang semakin memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang dikumpulkan cukup mendalam.
 - b. Dokumentasi, teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder yang dilaksanakan dengan cara pengumpulan data yang bersumber pada arsip dan dokumen-dokumen yang ada pada arsip dan pada masing-masing situsya.
 - c. Observasi, yaitu pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati berbagai kegiatan dalam melaksanakan tugasnya.

Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis data model interaktif yang terdiri atas empat komponen, yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Kondensasi Data, merupakan proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraskan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya.
2. Penyajian Data, yaitu sebuah pengorganisasian, penyatuan dari informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi
3. Penarikan Kesimpulan, Kesimpulan mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan data di lapangan, pengkodeannya, penyimpanannya, dan metode ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan- tuntutan pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah melanjutkannya “secara induktif”.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum SMP Negeri 7 Samarinda

SMP NEGERI 7 Samarinda yang terletak di Jalan H.M. Kadrie Oening Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur yang berdiri tanggal 09 Oktober 1982 dengan :

1. SK Mendikbud RI : 1982
2. Nomor SK : 0299/0/1982
3. Tanggal SK : 09 Oktober 1982
4. Type Sekolah : Terakreditasi A
5. Nomor Kode N.S.S : 201166001033

Sekolah ini berdiri dengan kondisi gedung yang permanen dengan luas halaman seluas 4000 m², bersamaan luas bangunan gedung seluruhnya adalah 4.072 m² serta mempunyai 1 rumah dinas kepala sekolah dan 3 rumah/mess untuk guru. Adapun status kepemilikan tanah SMPN 7 Samarinda memiliki sertifikat tanah pertanggal 30 Maret 2000 dengan luas tanah seluas 17.250 m² dengan nomor AN. 583793.

Implementasi Program Kurikulum 2013

Sosialisasi Kurikulum

Sosialisasi Kurikulum pada hakikatnya merupakan proses pembelajaran kepada tenaga pengajar untuk mempelajari kurikulum yang akan diterapkan sesuai dengan konsep pengembangan kurikulum yang mana diharapkan dalam implementasinya dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. sosialisasi yang diberikan kepada guru-guru dalam penerapan kurikulum 2013 belum efektif dan sangat tergesa-gesa, sosialisasi hanya

diadakan beberapa bulan sekali yaitu pada bulan maret dan juli 2013 meskipun dalam sosialisasi diadakan oleh perwakilan kementerian pendidikan dan kebudayaan secara langsung tetapi masih dinilai belum efektif sehingga guru-guru banyak yang masih belum paham mengenai kurikulum 2013. Hal tersebut harus di telaah lebih lanjut agar tidak ada lagi ketidakpahaman dari tenaga pengajar dalam mengembangkan kurikulum 2013 terkhusus dalam pemberian nilai yang dianggap sangat sulit oleh sebagian besar guru yang memiliki usia lanjut dan terkadang pembelajaran juga tidak berjalan optimal dikarenakan kurangnya fasilitas yang ada. Sekolah juga tentunya harus mendukung penuh untuk pelatihan ini dengan seringnya mengadakan workshop kurikulum 2013.

Kualitas Tenaga Kependidikan

Salah satu ujung tombak keberhasilan penerapan kurikulum 2013 ini ialah terletak pada kualitas guru. Dimana guru yang ditugaskan mengikuti sosialisasi kurikulum 2013 harus benar mengikuti kegiatan ini dengan baik dalam memahami kurikulum ini secara komprehensif. Dengan memanfaatkan moment sosialisasi ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam Implementasi Kurikulum 2013. Pengarahan atau sosialisasi yang diberikan kepada guru-guru dalam penerapan kurikulum 2013 belum efektif dan sangat tergesa-gesa dan harus di telaah lebih lanjut agar tidak ada lagi ketidakpahaman dari tenaga pengajar dalam mengembangkan kurikulum 2013 terkhusus dalam pemberian nilai yang dianggap sangat sulit oleh sebagian besar guru yang memiliki usia lanjut dan terkadang pembelajaran juga tidak berjalan optimal dikarenakan kurangnya fasilitas yang ada. Sekolah juga tentunya harus mendukung penuh untuk pelatihan ini dengan seringnya mengadakan workshop kurikulum 2013

Sarana dan Prasarana untuk Menunjang Proses Belajar Mengajar

Sarana dan prasarana yang menjadi penunjang daripada proses kegiatan belajar mengajar baik indoor maupun outdoor sangat berpengaruh. Semakin lengkap sarana yang dimiliki maka akan semakin baik juga dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sarana dan prasarana yang tersedia di SMP Negeri 7 yang digunakan selama ini oleh para siswa sudah cukup baik namun memang harus diperhatikan lebih lanjut karena ada beberapa kelengkapan yang penting keberadaannya disekolah tidak tersedia dengan baik.

Proses Pembelajaran Kurikulum 2013

para siswa yang diterapkan kurikulum 2013 penulis menemukan jawaban sebagian menyetujui dan tidak menyetujui dengan perubahan kurikulum 2013 namun menerima dengan adanya kebijakan tersebut karena konsep kurikulum dianggap baik dan dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan zaman saat ini. Sebaiknya guru lebih berani untuk menerapkan metode sumber belajar yang bervariasi meskipun karakteristik siswa lebih terbiasa dengan cara belajar satu arah. Namun apabila hal ini dilakukan secara terus menerus akan

mengubah kebiasaan dan karakteristik siswa untuk lebih siap dengan proses pembelajaran kurikulum 2013. Hal ini tentunya tidak luput dari dukungan yang optimal dari sekolah.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

Faktor Pendukung

Faktor pendukung adanya kerjasama antara semua komponen sekolah dalam penerapan kurikulum 2013, kerjasama ini sendiri merupakan suatu komitmen untuk mencapai tujuan dari kurikulum 2013, yaitu menjadikan siswa kreatif dan juga inovatif melalui proses pembelajaran yang diterapkan. Sehingga siswa tidak hanya belajar dengan dan terpaku pada penjelasan guru saja tetapi juga mencari pengetahuan lainnya diluar pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Selain itu adanya pelatihan-pelatihan yang ditujukan kepada guru secara bertahap dapat menjadi salah satu faktor yang turut mendukung program Implementasi Kurikulum 2013.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam implementasi kurikulum 2013 adalah ketidaksiapan kurikulum 2013. Hal ini dapat dilihat pada pendistribusian buku-buku pelajaran atau modul penunjang yang masih sangat kurang dan tidak sesuai dengan jumlah siswa. Untuk penggunaan buku para siswa harus bergantian dengan siswa lainnya, hal tersebut menjadikan siswa belajar dalam keadaan yang tidak optimal, para siswa hanya dapat belajar di sekolah untuk penggunaan buku tetapi tidak dapat dibawa pulang sehingga siswa tidak dapat belajar menggunakan buku ketika belajar di rumah, selain itu sarana dan prasarana yang terdapat di SMP Negeri 7 Samarinda belum memadai.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Implementasi Program Kurikulum 2013 di SMP Negeri 7 Samarinda kurikulum 2013 benar-benar diterapkan di Sekolah dengan baik, meskipun dalam perencanaannya belum berjalan secara optimal ini dibuktikan dengan sudah melaksanakan konsep-konsep kurikulum 2013 dalam proses pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari antusias para siswa dalam proses pembelajaran maupun untuk mencari materi pembelajaran yang mana penerapan kurikulum ini dilakukan untuk mempermudah dan memperlancar jalannya proses belajar mengajar di sekolah. Kurikulum yang diterapkan kepada para siswa di SMP Negeri 7 Samarinda adalah kurikulum yang dapat menciptakan siswa yang berkualitas, disiplin, kreatif dan aktif sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Walaupun tidak bisa dipungkiri setiap kurikulum pasti memiliki kekurangan dan kelebihan

masing-masing. Pemerintah terus berupaya untuk memajukan pendidikan Indonesia melalui inovasi-inovasi perubahan kurikulum seiring dengan pergantian menteri pendidikan.

2. Adapun faktor pendukung dan penghambat implementasi kurikulum 2013 adalah :
 - a. Faktor Pendukung
Ketersediaan buku dari pemerintah sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan standar pembentuk kurikulum penguatan peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan dan penguatan manajemen dan budaya sekolah.
 - b. Faktor Penghambat
Kurang optimalnya sosialisasi dari implementasi program kurikulum 2013 dilihat dari masih banyak pihak terkait yang belum memahami konsep dari kurikulum 2013 yang dianggap cukup rumit. Sarana dan Prasarana dari sekolah untuk menunjang kegiatan belajar mengajar belum memadai jika harus diterapkan kurikulum 2013, selain itu juga pendistribusian buku paket sebagai media bahan ajar tidak terdistribusi secara baik.

Saran

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan mengalokasikan Anggaran guna menggalakkan pelatihan kepada Tenaga Kependidikan. Sehingga tidak ada lagi keterbatasan pengetahuan atau ketidakpahaman konsep kurikulum 2013 khususnya untuk input nilai yang menggunakan Teknologi Informasi.
2. Tim evaluasi kurikulum turun kelapangan baru merumuskan kurikulum sehingga kedepannya sesuai fakta dan realitas daerah-daerah di Indonesia. Sehingga tidak menyebabkan shock bagi masyarakat.
3. Dinas Pendidikan dapat memberikan tambahan modul kemudian perbaikan sarana dan prasarana sekolah dimaksimalkan, serta sekolah dapat mengefisienkan jumlah siswa-siswi di kelas agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.
4. Guru sebaiknya bersifat pro aktif terhadap program-program yang berkaitan dengan implementasi kurikulum 2013 seperti sering mengikuti pelatihan dan seminar kurikulum 2013. Sosialisasi diharapkan dapat berisi mengenai peningkatan kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran berbasis informasi dan teknologi, strategi pembelajaran dan metode pembelajaran yang efektif.

Daftar Pustaka

- Dantes, Nyoman. 2012. Metode Penelitian. CV Andi.Bandung
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah mada university press. Yogyakarta.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2006. Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik: Berbasis Dynamic Policy Analisis. Gava Media. Yogyakarta.
- Madani, Muhlis. 2011. Dimensi Interaksi Aktor dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Mulyasa. 2013. Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulyoto. 2013. Strategi Pembelajaran Di Era Kurikulum 2013. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Muzamiroh, Mida Latifatul. 2013. Kupas Tuntas Kurikulum 2013. Kata Pena. Surabaya.
- Pasolong, harbani. 2010. Teori administrasi publik. Alfabet. Bandung.
2012. Teori administrasi publik. Alfabet. Bandung.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti.2012. Implementasi kebijakan publik. Gava Media. Yogyakarta
- Sofan Amri. 2013. Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013. Prestasi Pustaka. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung
.2006. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
- Wahab, Abdul Solichin. 2006. Analisis kebijakan: dari formulasi ke implementasi kebijakan Negara. Bumi Aksara. Jakarta.
- Widodo, Joko. 2010. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Bayu media. Malang.

Dokumen-dokumen:

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
Permendikbud No.68 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama SMP/MTs